

## **KETIMPANGAN KELAS DALAM SISTEM TANAM PAKSA: ANALISIS MARXISME NOVEL MAX HAVELAAR KARYA MULTATULI**

Nucky Restia Melani, Rinjani Destia Sari, Stefany Maranatha Sinaga, Seli Mauludani.  
Universitas Singaperbangsa Karawang  
email: [2210631080079@student.unsika.ac.id](mailto:2210631080079@student.unsika.ac.id)

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan mengkaji ketimpangan kelas, yaitu perbedaan mencolok dalam akses kekuasaan kekuasaan dan sumber daya antarkelompok sosial, dalam novel Max Havelaar karya Multatuli. Ketimpangan kelas merupakan suatu kejadian yang terjadi saat adanya perbedaan yang signifikan salah satunya meliputi kekuasaan, sumber daya, pendidikan dan keadilan dalam suatu kelompok masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan sosiologi sastra marxisme, pendekatan ini menyoroti praktik eksploitasi dalam sistem tanam paksa serta perlawanan tokoh Havelaar terhadap penindasan rakyat pribumi. Teknik pengumpulan data adalah studi pustaka dan deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil penelitian ini mempresentasikan ketidakadilan struktural rakyat pribumi dan menjadi kritik terhadap dominasi kolonial. Karya ini mempertegas fungsi sastra sebagai media kesadaran sosial dan perjuangan kelas.

**Kata Kunci:** Novel, Ketimpangan Kelas, Sosiologi Sastra, Tanam Paksa.

### **ABSTRACT**

*This study aims to examine class inequality, namely the striking differences in access to power and resources among social groups, in Multatuli's novel Max Havelaar. Class inequality occurs when there are significant differences in power, resources, education, and justice within a community. This study employs a qualitative descriptive method with a Marxist literary sociology approach, which highlights the practices of exploitation within the forced labor system and Havelaar's resistance against the oppression of the indigenous people. Data collection techniques include literature review and descriptive analysis. The research findings reveal structural injustice against the indigenous people and critique colonial domination. This work reinforces literature's role as a medium for social awareness and class struggle.*

**Keywords:** Novel, Class Inequality, Literary Sociology, Forced Labor.

## PENDAHULUAN

Sosiologi sastra dapat dikenal dengan penelaahan objektif mengenai makhluk hidup khususnya manusia dalam suatu masyarakat pada proses-proses sosialnya. Hal tersebut tentu menempatkan semua fenomena sosial sebagai suatu bahan kajian, seperti adat istiadat, kebiasaan, budaya sastra dan lain-lain. Secara singkat, sosiologi dapat diartikan sebagai disiplin yang memiliki tujuan untuk mengkaji perilaku manusia, pembentukan struktur sosial dan kesepakatan bersama dalam ekonomi, politik, budaya dan lain-lain (Tri Wahyudi dalam Durkheim, 1958:24).

Sehubungan dengan hal tersebut mengenai sosiologi, karya sastra diyakini sebagai suatu cara dalam menumbuhkan lagi suatu hubungan individu dengan kekeluargaan, masyarakat, agama, politik dan lain-lain, guna menjadi satu alternatif aspek estetis, menyesuaikan diri dan melakukan perubahan dalam masyarakat (Tri Wahyudi dalam Swingewood, 1972:12).

Karena hal tersebut, timbul pemikiran bahwa sebuah sastra sebagai satuan yang tidak berhubungan dengan sosiologi, karena sastra dapat berdiri sendiri sebagai suatu ilmu kajian yang bisa didekati lewat elemen-elemen yang ada didalamnya. Bahkan, seni karya sastra dianggap melampaui suatu deskripsi dan analisis ilmiah obyektif, menembus permukaan sosial serta dapat menjadi saran untuk menggambarkan perasaan seseorang pada kehidupannya (Tri Wahyudi dalam Swingewood, 1972: 12). Hal ini membuat menggiring

pemikiran kuat bahwa karya sastra mampu meringkas banyaknya peristiwa yang dapat dijelaskan dengan sistematis dan terperinci melalui metode sosiologi, yang kemudian disebut sebagai sosiologi sastra.

Ketimpangan kelas merupakan suatu kejadian yang terjadi saat adanya perbedaan yang signifikan salah satunya meliputi kekuasaan, sumber daya, pendidikan dan keadilan dalam suatu kelompok masyarakat. Pada ranah kolonialisme, suatu ketimpangan tidak hanya tentang akibat dalam sistem kekuasaan yang sifatnya menindas, tetapi juga sebagai kesenjangan yang ditanam dari strategi penguasaan. Sebagai contoh adanya ketimpangan sosial dalam sejarah Indonesia yaitu pada masa pemerintahan yang dikuasai oleh kolonial Belanda melalui penerapan program kerja paksa atau *Cultuurstelsel* kurang lebih pada tahun 1830. Peristiwa tersebut kemudian dijadikan sebagai latar dalam novel Max Havelaar karya Multatuli (Eduard Douwes Dekker) yang telah muncul pada tahun 1860.

*Cultuurstelsel* yang biasa disebut sebagai kerja paksa, merupakan suatu landasan yang dibuat oleh G.J Johannes van den Bosch tahun 1830 yang mempunyai aturan bahwa setiap warga wajib memberikan sebagian tanah milik mereka untuk ditanam komoditi ekspor seperti kopi, tebu, tarum dan lain-lain. Motif utama sistem tersebut yaitu karena terdapat kesulitan keuangan yang dialami oleh pemerintahan Belanda sebagai dampak pada perang Jawa pada tahun 1825-1830 di Indonesia dan negeri Belanda. Gubernur mendapatkan izin khusus untuk melakukan sistem kerja paksa yang bertujuan dalam mengisi kas pemerintahan Belanda yang tidak terisi dan menutup defisit pengeluaran rencana pemerintahan Belanda (Wulan Sondarika:59).

Dalam sejarah suatu ketimpangan bukanlah hal yang baru. Kita bisa menemukan ada banyak contoh ketimpangan dalam sejarah. Beberapa contohnya yaitu pembangunan pada zaman Romawi yang menggunakan para budak dan menggunakan sistem feodal. Dapat dikatakan bahwa ketimpangan merupakan sebuah ketidakadilan dalam status kedudukan yang dialami oleh masyarakat dan merupakan kondisi ketidakseimbangan karena perbedaan aspek-aspek dalam segi ekonomi, sosial dan budaya.

Marxisme merupakan suatu pengetahuan yang menganut pemikiran-pemikiran Karl Marx. Seseorang bernama Karl Marx ini merupakan seorang filsuf dan ahli perekonomian dalam bidang politik yang memiliki teori kemasyarakatan dari Prusia. Marx memang terkenal sebagai penulis mengenai banyak hal dalam hidupnya, tetapi ia lebih menguasai mengenai analisinya dalam sejarah, khususnya mengenai pertentangan kelas, yang dapat dirangkum sebagai sejarah dalam berbagai kalangan masyarakat hingga saat ini yang saat ini tertulis dalam kalimat pembuka dari Manifesto Komunis. Secara garis besar, Marxisme merupakan bentuk protes dan ketidaksetujuan Marx kepada paham kapitalisme dengan pandangan bahwa para kapitalisme mendapatkan keuntungan dengan mengorbankan kaum proletar (Subur Hendriwani: 22).

Dalam kajian sastra, pendekatan Marxisme merupakan alat analisis yang nyata dalam menelaah struktur ketimpangan kelas. Pada novel *Max Havelaar*, Marxisme berfokus pada konflik antara kelas penguasa atau Borjuis dan kelas tertindas (Proletariat). Hal ini juga menggambarkan bagaimana bentuk penekanan ideologi yang dominan digunakan untuk mempertahankan status kekuasaan.

Selain itu novel ini memberikan manfaat bagi pembaca dalam memahami hubungan antara karya sastra dan realitas sosial, khususnya tentang ketimpangan kelas dan sistem kolonialisme. Pembaca juga dapat memperoleh wawasan mengenai bagaimana teori marxisme dapat digunakan dalam menganalisis ketidakadilan sosial melalui pendekatan sosiologi sastra.

Penelitian oleh Nadia Andi Rahmalia, Reva Zahra Salwa, dan Indah Fadhillah pada maret 2025 dengan judul “*Perjuangan Tokoh Pribumi Pada Novel “Namaku Alam” Karya Leila S. Chudori*” yang menggambarkan realitas sejarah dan stratifikasi sosial yang menggunakan teori Karl Marx melalui pandangan sejarah dan konflik sosial yang diwujudkan ke dalam pembagian kelas sosial yaitu kelas atas (penindas) dan kelas bawah (Tertindas).

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Tri Ratna Dewi pada tahun 2023 yang berjudul “*Analisis Nilai Marxisme dan Diskriminasi Kasta Sosial Dalam Novel Jejak Langkah Karya Pramoedya Ananta Toer*” yang mengandung diskriminasi kasta sosial dan nilai marxisme. Hasil penelitian ini menunjukkan pada novel tersebut terdapat diskriminasi kasta diantaranya adalah penindasan, pengucilan, perampasan hak-hak, perbuatan sewenang-wenang, perlakuan tidak adil dan pembatasan kebebasan yang dilakukan oleh kaum borjuis. Dan terdapat nilai marxisme anti kapitalisme atau persamaan seperti membela harga diri, mempertahankan hak, menolak tuduhan pada perilaku yang merendahkan diri, melindungi hak individu dari perilaku orang lain, dan penghapusan perbudakan serta adanya usaha dan kesadaran akan menegakkan keadilan.

Berbeda dengan kedua penelitian sebelumnya, Penelitian ini menganalisis

Novel Berjudul Max Havelaar karya dari Multatuli yang secara keseluruhan mengkritik sistem tanam paksa pada zaman kolonial Belanda sebagai bentuk eksploitasi kelas. Penelitian ini berfokus pada pendekatan Marxis yang menekankan ketimpangan struktural antara kaum borjuis (penguasa) dan rakyat pribumi (yang tertindas) yang menjadi korban dalam proses yang dilakukan oleh kebijakan kolonialisme. Selain itu, penelitian ini berfokus pada pengarahan akar historis ketimpangan kelas akibat terjadinya proses tanam paksa yang dilakukan oleh kaum kapitalisme, dan penelitian sebelumnya lebih berfokus pada dinamika kelas dan nilai nasionalisme dan perjuangan identitas sosial.

Pada penelitian ini, memiliki tujuan untuk mengkaji segala jenis ketimpangan kelas pada buku novel yang berjudul Max Havelaar karya Multatuli yang menggunakan pendekatan Marxisme. Penelitian ini mengungkap mengenai sistem tanam paksa sebagai cara eksploitasi struktural yang mana hal tersebut menempatkan rakyat pribumi sebagai kelas bawah dan kolonial sebagai borjuis. Novel Max Havelaar merupakan sebuah objek kajian dalam penelitian ini yang menggambarkan bagaimana suatu kekuasaan kolonial dan pemerintah lokal bekerjasama dana eksploitasi rakyat pribumi untuk kepentingan kapitalis yang dilandasi tentang kebijakan. Melalui pendekatan Marxisme, penelitian ini menyoroti relasi oleh borjuis dan rakyat pribumi (Kelas tertindas). Cerita dalam novel ini memperlihatkan tentang konflik kelas, ideologi dan upaya perlawanannya pada penindasan akan sistem kekuasaan, penelitian ini berusaha mengungkap mengenai makna sosial yang mendalam pada karya sastra tersebut, dan juga menunjukkan relevansi tentang kritik sosial yang ada dalam novel terhadap

realitas sosial masyarakat pada masa itu dan masa kini.

Sebuah novel dapat didefinisikan sebagai bentuk pencitraan yang bebas, lebih rinci dan lebih banyak melibatkan berbagai permasalahan yang lebih kompleks (Nurgiyantoro, 2018: 8-12). Novel yang dibuat akan memberikan penjelasan dalam mengartikan setiap konflik dalam novel. Novel, sebagai narasi fiksi, memungkinkan penulis untuk mempelajari berbagai aspek keberadaan, seperti kekacauan pribadi, interaksi sosial, dan pengajaran prinsip-prinsip humanistik. Memungkinkan pembaca untuk memahami plot dan berempati dengan sentimen, pengaturan, dan dilema karakter.

Karya Sastra yaitu sebuah nama yang diberikan masyarakat pada hasil tertentu(Siswanto, 2008: 81). Karya sastra mencerminkan imajinasi dan kreativitas manusia karena ditulis atau diucapkan dengan cara yang memiliki seni dan keindahan. Menurut nya, “karya sastra” secara harfiah diterjemahkan menjadi “literary work” adalah istilah yang diciptakan oleh masyarakat untuk menggambarkan bentuk-bentuk tulisan tertentu yang dianggap memiliki nilai. Ini berarti tidak setiap tulisan dapat dianggap sebagai karya sastra, hanya yang memenuhi beberapa kriteria seperti bahasa yang indah, makna yang dalam, dan kemampuan untuk membangkitkan emosi pembaca. Jenis karya ini dapat berupa puisi, cerpen, novel, drama, atau bentuk seni imajinatif lainnya yang bertujuan terutama untuk keindahan dan ekspresi ide. Publik yang mengevaluasi dan mengakui sebuah tulisan sebagai karya sastra berdasarkan elemen keindahan, keunikan, dan kedalaman makna.

Teori sastra adalah studi tentang prinsip, kategori, dan kriteria dalam suatu bentuk sastra tertentu. Menganalisis karya atau bagian konkret

dianggap sebagai kritik (pendekatan yang lebih statis) yang digabungkan dengan sejarah sastra (Rene Wellek & Austin Warren). Pernyataan ini membuktikan fakta bahwa karya sastra dapat dipelajari dari tiga sudut pandang yang saling melengkapi.

Belanda telah menetapkan kontrol atas Indonesia pada abad ke-18 dengan tiga tujuan utama yang disebut sebagai emas, kejayaan, dan injil. Pertama, emas merujuk pada kekayaan sebagai dorongan utama yang memotivasi Belanda untuk mengendalikan Indonesia karena mereka memanfaatkan sumber daya alam rempah-rempah, hasil perkebunan, dan mineral Indonesia untuk memperkaya negara mereka. Kejayaan adalah ambisi politik Belanda untuk melakukan ekspansi teritorial lebih lanjut dalam persaingan kolonial dengan kekuatan Eropa lainnya seperti Inggris dan Portugal.

Salah satu kebijakan yang paling eksplorasi disebut Cultuurstelsel atau Tanam Paksa (Sistem Penanaman Paksa) yang diperkenalkan pada tahun 1830 dengan Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch sebagai penanggung jawab. Di bawah sistem ini, setiap desa atau distrik diharuskan untuk menyisihkan 20 persen dari lahan mereka untuk penanaman tanaman perkebunan yang dapat dieksport seperti gula, kopi, teh, dan tarum(nilai). Hasil dari setiap lahan lahan yang dimiliki pribumi diharuskan untuk dijual kepada pemerintah kolonial pada tarif yang ditentukan yang dalam hal ini akan dikendalikan oleh Belanda. Kebijakan ini menimbulkan penderitaan yang parah bagi rakyat Indonesia, karena banyak lahan produktif yang tersedia untuk ditanami dialihkan dari produksi makanan, dan petani yang gagal memenuhi target dikenakan hukuman berat.

Pertama, esensi dari yang pertama adalah paradigma: teori sastra berfungsi sebagai kerangka dasar. Ini menjelaskan prinsip-prinsip dasar, jenis jenis, dan kriteria dari suatu subjek dalam disiplin akademis. Teori memberikan kerangka, kritik menerapkannya pada satu unit teks yang terpilih, dan kemudian sejarah memberikan dimensi temporal serta konteks budaya. Akibatnya, pemeriksaan sastra menjadi holistik karena melampaui pandangan terhadap teks secara terpisah, tetapi juga berkaitan dengan sistem sastra dan masyarakat.

Kajian sosiologi sastra jika dilihat dari pendekatan ekstrinsik pada level berikutnya memiliki definisi bahwa permasalahan pembaca dan pengaruh social karya sastra sehingga pada tataran ini memang sulit karena karya sastra hanyalah karya seorang pengarang sehingga disangskakan kemampuannya untuk dapat mempengaruhi masyarakat.(Austin Warren & Renne Wellek dalam buku Melani Budianta) Dalam teori sosiologi sastra juga bertugas untuk menelusuri status kelas sosial, meneliti ketergantungan sastrawan pada kelas penguasa, serta mempelajari sumber ekonomi dan prestisnya dalam masyarakat (Sujarwa, 2019:33). Dalam kajian sosiologi sastra, pendekatan ekstrinsik yang dikemukakan oleh Rene Wellek dan Austin Warren menekankan hubungan sastra dengan aspek luar teks, yaitu konteks sosial, politik, dan budaya. Salah satu elemen krusial dari pendekatan ini adalah menganalisis peran pembaca dan pengaruh sosial dari sastra. Akan tetapi, tampaknya ini tidak sulit untuk dilakukan karena sastra merupakan hasil karya dari seorang individu, yaitu penulisnya.

Marxisme adalah teori sosial-ekonomi yang dikembangkan oleh Karl Marx dan Friedrich Engels, terutama

melalui karya-karya seperti “Das Kapital”(1867) dan “Manifesto Komunis”(1848). Teori ini menyatakan bahwa kapitalisme secara inheren bersifat eksploratif, di mana kelas borjuis (pemilik modal) menindas kelas proletar (pekerja). Marx berargumen bahwa konflik kelas ini hanya dapat diselesaikan melalui revolusi proletar untuk menghapus kepemilikan pribadi dan menciptakan masyarakat tanpa kelas. Teori Marxisme kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh para pemikir seperti Lenin dan Trotsky, menjadi dasar bagi berbagai gerakan sosialis dan komunis di seluruh dunia (Suseno, 2014:123-124 ).

Beberapa aspek penting dalam teori kelas Marx perlu digaris bawahi. Pertama, terlihat betapa dominannya peran struktur dibandingkan kesadaran dan moralitas. Konflik antara buruh dan majikan bersifat objektif karena didasarkan pada kepentingan yang ditentukan posisi mereka dalam sistem produksi. Kedua, karena kepentingan kelas pemilik dan buruh secara objektif bertolak belakang, sikap mereka terhadap perubahan sosial pun berbeda. Kelas pemilik dan kelompok elite cenderung konservatif karena status quo menguntungkan mereka. Ketiga, bagi Marx, kemajuan sosial hanya bisa dicapai melalui revolusi. Ketika kelas tertindas memperoleh kekuatan, mereka harus menggulingkan kelas penguasa. Sebaliknya, kelas atas akan selalu mempertahankan dominasinya karena perubahan mengancam posisi mereka.

## METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan metode deskriptif, yaitu metode yang bertujuan untuk menggambarkan fakta-fakta yang ditemukan dalam teks, kemudian dilanjutkan dengan proses analisis.

Menurut Moleong (2013:6), penelitian kualitatif bertujuan untuk memperoleh pemahaman menyeluruh mengenai fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, seperti tindakan, persepsi, motivasi, dan pengalaman lainnya. Pemahaman tersebut disajikan secara deskriptif melalui penggunaan kata-kata dan bahasa, serta dilakukan dalam konteks yang alami dengan memanfaatkan beragam metode ilmiah. Suharsimi Arikunto (2013:3) menjelaskan bahwa penelitian deskriptif merupakan jenis penelitian yang dilakukan untuk mengkaji suatu keadaan, kondisi, atau aspek tertentu, yang hasil akhirnya disajikan dalam bentuk laporan tertulis.

Pendekatan yang digunakan adalah sosiologi sastra, sebuah pendekatan yang melihat karya sastra sebagai refleksi dari realitas sosial masyarakat. Dasar pemikiran dalam pendekatan ini adalah bahwa karya sastra tidak lahir dari ruang hampa, melainkan dipengaruhi oleh kondisi sosial budaya masyarakat di sekitarnya. Sosiologi sastra menjadi alat kritik yang memungkinkan peneliti untuk menelusuri unsur-unsur sosial yang tercermin baik dalam karya sastra maupun dalam kehidupan nyata.

Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber primer, yaitu novel Max Havelaar karya Multatuli yang digunakan secara langsung sebagai objek kajian. Dari novel tersebut, peneliti mengumpulkan data berupa kutipan narasi, dialog antartokoh, dan deskripsi situasi sosial yang berkaitan dengan isu ketimpangan kelas dalam sistem tanam paksa. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan pencatatan. Studi

kepustakaan dilakukan dengan menelaah berbagai sumber tertulis yang relevan, baik berupa novel maupun teori-teori pendukung yang berkaitan dengan fokus penelitian. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi (content analysis). Menurut Krippendorff (1980:21), analisis ini bertujuan untuk menarik kesimpulan yang valid dari teks berdasarkan konteksnya. Dalam penelitian ini, data analisis dengan cara mengidentifikasi tema-tema sosial dalam novel Max Havelaar, khususnya yang berkaitan dengan ketimpangan sosial.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Marx menyebutkan terdapat tiga tahapan terjadinya kelas-kelas sosial. pertama, adanya kontradiksi kelas (konflik sosial). kontradiksi kelas ialah kontradiksi kepentingan antara kelas kapitalis dan kelas proletar. Kepentingan kelas kapitalis umumnya selalu terpenuhi, sedangkan kelas proletar sangat sulit untuk terpenuhi. Kedua, antagonisme kelas (kesadaran kelas). Pada tahap ini (kesadaran kelas) pada tahap ini kelas proletar mulai menaruh curiga terhadap kelas kapitalis. Kemudian tahap yang terakhir yaitu adanya tindakan kolektif anggota kelas yang ditujukan kepada anggota kelas lain yang berlawanan. Tindakan inilah yang disebut marx sebagai perjuangan kelas.

### **1. Ketimpangan Kelas Sosial**

Ketimpangan merupakan suatu masalah yang biasanya terdapat permasalahan yang kurang mendapatkan perhatian serius oleh pemerintah, padahal kesenjangan sosial-ekonomi dapat mempengaruhi antar penduduk di Indonesia (Agusta, dkk 2014 dalam Haugthon dan Khandker 2013). Haugthon mengatakan bahwa

ketimpangan ialah bentuk-bentuk ketidakadilan yang terjadi dalam proses membangun. Terdapat informasi sejarah yang menunjukkan bahwa ketimpangan sudah ada sejak lama dan bersifat struktural, terutama sebagai akibat dari zaman kolonialisme pada abad ke-17. Hal ini dapat dibuktikan melalui kutipan berikut:

- “Tidaklah terlalu tepat jika aku menyebut asisten residen sebagai “pemimpin” bupati. Aku harus menjelaskan mekanisme pemerintahan di wilayah ini. Sejauh menyangkut hubungan penduduk dengan negara penguasa, harus dibagi menjadi dua bagian yang sangat besar. Bagian pertama terdiri dari suku-suku yang semua raja dan pangerannya mengakui kekuasaan Belanda, tapi juga tetap mempertahankan pemerintahan langsung, dalam derajat yang kecil atau besar, di tangan mereka. Bagian kedua, yang terdiri dari seluruh wilayah Jawa mungkin dengan pengecualian yang sudah jelas dan sangat tidak berarti takluk seluruhnya dan secara langsung kepada Belanda.” (Hal 90)

Kutipan di atas menunjukkan bahwa terdapat struktur kekuasaan yang tidak setara antara penduduk lokal dan pemerintahan kolonial Belanda. Di lain sisi, raja-raja dan pangeran masih diberikan kewenangan tetapi terbatas dalam memerintah rakyat mereka. Namun, pada kenyataannya kekuasaan raja-raja dan pangeran tersebut berada dalam kendali langsung dan tidak langsung oleh pemerintahan kolonial. Dalam hal ini, masyarakat pribumi terjebak dalam dua lapisan kekuasaan antara lain bangsawan lokal yang masih

mempertahankan sedikit otoritas dan pemerintah kolonial yang memiliki kendali utama. Hal tersebut menciptakan suatu ketimpangan kelas sosial yang nyata, rakyat kelas bawah menjadi objek kekuasaan dari dua lapisan elite yang keduanya sama-sama mengeksploitasi mereka. Ketimpangan tersebut menjadi kritik yang disampaikan multatuli terhadap sistem kolonialisme yang menindas.

- “**Gubernur jenderal dibantu oleh sebuah dewan. Namun, dewan ini tidak mempunyai kekuasaan untuk mengubah keputusan- keputusannya.** Di Batavia, cabang-cabang pemerintahan yang berbeda dibagi menjadi departemen-departemen yang dikepalai oleh direktur, yang membentuk mata rantai antara pemerintahan tertinggi gubernur jenderal dan residen di provinsi provinsi. Namun, dalam masalah-masalah yang bersifat politik, residen-residen ini berhubungan langsung dengan gubernur jenderal.” (Hal 91)

Kutipan tersebut menggambarkan bagaimana pola struktur pemerintahan yang dibangun oleh kolonial Hindia Belanda secara hierarkis dan sentralisme. Kekuasaan tertinggi berada di tangan gubernur jenderal dan lapisan Eropa elite. Kedudukan dewan yang seharusnya menjadi seorang penyeimbang kekuasaan justru tidak memiliki wewenang untuk menolak dan mengubah keputusan gubernur jenderal. Struktur ini tidak memberikan ruang untuk partisipasi masyarakat dalam pemerintahan Indonesia, rakyat kehilangan hak bersuara serta menjadi korban dari sistem yang membuat rakyat

dalam posisi kedudukan sosial paling rendah.

- “Bupati walaupun hubungannya dengan pemerintah dan departemennya adalah sebagai pejabat bayaran; selalu berasal dari golongan bangsawan tinggi di daerahnya, dan sering kali dari keluarga pangeran yang telah memerintah wilayah itu atau daerah di sekitarnya sebagai penguasa independen. **Politik Belanda memang memanfaatkan pengaruh feodal kuno pangeran-pangeran, yang di Asia pada umumnya sangat besar dan dipandang oleh sebagian besar suku sebagai bagian dari agama mereka.** Karena, dengan mengangkat mereka sebagai pejabat bayaran kerajaan, terciptalah semacam hierarki yang dikepalai oleh pemerintah Belanda dan diwakili oleh gubernur jenderal.” (Hal 93)

Kutipan diatas memperlihatkan bagaimana suatu sistem yang dibuat oleh pemerintah kolonial memanfaatkan struktur sosial feodal dalam mempertahankan kekuasaan. Hal tersebut dilakukan dengan cara menunjuk seorang bupati dari kalangan bangsawan tinggi sebagai pejabat bayaran dan pemerintah kolonial memperkuat kelas atas lokal sambil tetap mengendalikan mereka dari pusat. Rakyat biasa tidak hanya tersingkirkan dari pemerintahan dan kekuasaan, tetapi mereka juga dikendalikan oleh dua lapisan elite, yaitu oleh bangsawan lokal pribumi yang masih dihormati karena status feodalnya dan pemerintah kolonial yang menjadi otoritas tertinggi.

- “Pendapatan pembesar Jawa bisa dibagi menjadi empat bagian. Bagian pertama adalah upah bulanan, yang kedua adalah jumlah tetap sebagai pengganti pembelian hak-hak mereka oleh pemerintah Belanda, yang ketiga adalah premi dari hasil produksi kabupaten mereka, seperti kopi, gula, indigo, kayu manis, dan lain-lain. **dan yang terakhir adalah penggunaan tenaga dan harta rakyat mereka secara sewenang-wenang.**” (Hal 101)

Kutipan tersebut menjelaskan tentang bagaimana para pembesar-pembesar di Jawa mendapatkan berbagai bentuk pendapatan salah satunya bersumber dari eksploitasi rakyat. Selain itu, mereka juga menerima gaji dari premi resmi para pemerintah kolonial dan juga diizinkan secara langsung maupun tidak langsung untuk memanfaatkan tenaga dan harta rakyat secara sewenang-wenang. Hal tersebut menunjukkan adanya ketimpangan kelas yang sangat tajam. Para penguasa lokal yang elite diperkaya dan diberi kekuasaan luas, sementara rakyat kecil menjadi objek penindasan dan sumber keuntungan. Sistem ini mencerminkan suatu tindakan kolaborasi antara kekuasaan kolonialisme dan kaum elite pribumi dalam mempertahankan struktur sosial yang menindas dan terlihat tidak adil.

- “Para pejabat Eropa juga menerima premi yang sebanding dengan hasil yang diperoleh. **Sudah menjadi fakta bahwa orang Jawa miskin digerakkan oleh kekuatan ganda,** bahwa mereka diusir dari sawah mereka sendiri, dan bencana kelaparan sering kali muncul akibat tindakan-tindakan ini. **Tetapi bendera kapal-kapal Belanda**

**kaya berkepak-kepak riang di Batavia, Semarang, Surabaya, Pasuruan, Besuki, Probolinggo, Pacitan dan Cilacap.**” (Hal 104)

Kontras yang tajam antara para pejabat Eropa dengan penderitaan rakyat pribumi. Para pejabat kolonial menerima premi yang besar melalui hasil yang didapatkan dari tanah jajahan, di lain sisi rakyat pribumi justru kehilangan sawah milik mereka sendiri, jatuh miskin dan kelaparan. Kekayaan yang mengalir ke kapal milik Belanda menjadi bukti bahwa terdapat kesejahteraan kelas penguasa kolonial di atas penderitaan rakyat kecil.

- *“Lagi pula, Verbrugge, orang-orang di Lebak menyalahgunakan kekuasaan mereka dengan cara yang mengerikan kau seharusnya tahu itu, tahukah kau?” “Aku tahu itu!” Lanjut Havelaar, “**Aku benar-benar tahu itu! Bukankah Tuan Slotering meninggal November lalu? Nah, sehari setelah kematiannya, Bupati memaksa penduduk untuk bekerja di sawahnya tanpa bayaran. Kau seharusnya tahu itu, tahukah kau?**” (Hal 204)*

Kutipan ini mengungkap bagaimana sebuah penyimpangan terjadi ketika kekuasaan dimiliki oleh kaum elite pribumi seperti bupati, kekuasaan disalahgunakan memerintah rakyat. Saat itu terjadi kekosongan otoritas, karena meninggalnya seorang residen pada masa itu. Kekosongan tersebut dimanfaatkan oleh bupati untuk memaksa penduduk bekerja di sawah pribadinya tanpa bayaran. Hal tersebut, menggambarkan bagaimana kelas

penguasaan baik kolonial maupun pribumi bisa menyimpang dalam tanggung jawabnya dan menggunakan jabatan mereka untuk mendapat keuntungan yang lebih.

- “Namun kemudian datanglah orang-orang asing dari Barat yang mengangkat diri mereka sebagai pemilik tanah. Mereka ingin mendapat keuntungan dari kesuburan tanah ini, **dan memerintahkan orang pribumi untuk menyisihkan sebagian waktu dan tenaga mereka untuk menggarap tanaman-tanaman lain yang bisa menghasilkan keuntungan lebih tinggi di pasar-pasar Eropa.** Untuk membujuk rakyat jelata agar melakukan hal itu, mereka hanya perlu mengikuti kebijakan yang sangat sederhana.” (Hal 102)

Menjelaskan tentang situasi menjajah yaitu orang-orang dari Barat (penjajah) datang untuk mengakui tanah milik rakyat pribumi dengan cara mengatakan bahwa tanah tersebut milik mereka sendiri. Kemudian para penjajah memerintahkan rakyat untuk bekerja di ladang-ladang tersebut, mereka menyisihkan waktu dan tenaga yang seharusnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi justru digunakan untuk keuntungan penjajah. Penjajah hanya perlu memanfaatkan keramahan masyarakat pribumi untuk mendapatkan keuntungan.

- Lagi pula, para pejabat itu, para pengawas dan residen itu bukanlah pihak yang paling bersalah. **Pemerintah sendirilah yang seakan diserang oleh kebutaan yang tidak bisa dipahami.** Mengundang,

mendorong dan menghargai pengiriman laporan-laporan yang menyenangkan, **dan inilah terutama jawaban dari pertanyaan menyangkut penindasan penduduk oleh para pejabat pribumi.**” (Hal 372-373)

Dalam kutipan di atas, para pejabat lokal yaitu pengawas dan residen sering kali melakukan penindasan. Namun, mereka bukanlah satu-satunya yang patut disalahkan. Para pemerintah lokal lah yang telah tutup mata terhadap rakyat yang tertindas seperti laporan penderitaan rakyat yang disembunyikan demi citra baik dan keuntungan.

## 2. Kesadaran Kelas

Bagi Marx, suatu kelas hanya benar-benar ada ketika anggotanya menyadari adanya konflik dengan kelas lain. Tanpa kesadaran ini, mereka hanyalah sekelompok orang yang berada dalam posisi kelas yang sama, tetapi belum membentuk kesatuan yang nyata yang oleh Marx disebut sebagai kelas dalam dirinya. Namun, begitu kesadaran akan konflik itu muncul, mereka berubah menjadi kelas untuk dirinya, yaitu kelas yang secara aktif memperjuangkan kepentingan bersama. Kesadaran kelas, ketika mencapai titik matang, akan mendorong tindakan nyata, seperti upaya menghapuskan hak milik borjuis dan menyerahkan kekuasaan ekonomi kepada masyarakat melalui sistem diktator proletariat. Hal ini dibuktikan dengan kutipan di bawah ini:

- *“Kini, lihatlah apa yang telah kulakukan untuk menghentikan mereka. Siapapun yang menempati posisiku, mungkin akan menulis surat kepada Ludwig Stern, "Bahwa kami juga akan mengurangi komisi,*

*dan kami mengharapkan pertimbangan, mengingat sudah lamanya hubungan bisnis dengan Last & Co."(Hal 29)*

Dalam kutipan ini, perdagangan kopi sebagai suatu contoh kapitalisme kolonial karena begitu jelas, bagaimana ekonomi berkuasa dikuasai asing, Ludwig Stern dengan Last & Co., sementara yang bersangkutan hanya bisa mencoba untuk beradaptasi atau berharap. Pertama, relasi bisnis sudah selamanya hubungan bisnis yang dikatakan bagian tersebut juga menunjukkan seorang pebisnis asing ialah individu yang paling dominan disitulah. Itu adalah suatu karakteristik dari sistem kapitalisme kolonial, kapitalisme yang bercirikan kontrol dari negara maju.

- *"Sudah diperhitungkan bahwa firma kami, selama lima puluh tahun terakhir, memperoleh empat ratus ribu gulden dari Stern. Hubungan kami dimulai semenjak permulaan sistem kontinental, ketika kami menyelundupkan hasil bumi Kolonial dan semacamnya dari Helgoland. Tidak, aku tidak akan menurunkan komisi."(Hal 29)*

Praktik perdagangan ilegal dari Helgoland selama sistem kontinental mengungkapkan sifat kapitalisme kolonial yang membenarkan segala cara, termasuk melanggar hukum, untuk mempertahankan monopoli. Hubungan komersial yang berlangsung selama beberapa dekade ini bersifat asimetris: keuntungan tidak proporsional perusahaan Belanda atas biaya para petani yang terus-menerus terpinggirkan. Jadi, bagian ini mengungkapkan ciri-ciri mendasar

kapitalisme kolonial yang beroperasi dengan kekerasan struktural di mana kekayaan alami koloni yang di eksplorasi untuk menyokong industrialisasi dan kemakmuratan Eropa.

- *"Semenjak melaksanakan tugas-tugas saya di sini sebulan yang lalu, saya terutama telah menyibukkan diri dengan meneliti bagaimana para pejabat melaksanakan kewajiban mereka terhadap penduduk sehubungan dengan kerja-paksa, tuntutan, dan semacamnya."(Hal 498)*

Pada kutipan di atas menjelaskan bahwa menentukan efektivitas sistem seperti 'Cultuurstelsel' dari kutipan di atas dapat dilakukan dengan membandingkan hasil yang diinginkan dengan kenyataan di lapangan. Cultuurstelsel (sistem budidaya paksa), yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda di Indonesia Kolonial dari tahun 1830 hingga 1870, bertujuan untuk meningkatkan barang komoditas ekspor, terutama kopi, gula, dan indigo. Namun, dalam praktiknya, sistem ini hanya menjadi alat mekanis untuk memaksakan kesengsaraan dan eksplorasi penduduk, sementara pemerintah kolonial dan penguasa lokal yang berkolaborasi dengan mereka sepenuhnya menikmati keuntungan.

Masyarakat yang terbelakang seperti ini adalah hasil dari dominasi, banyak orang yang masih belum mampu secara efektif menghadapi kenyataan menjadi bagian dari hal itu. Ini termasuk kegiatan ekonomi yang terputus-putus dan bagian-bagian yang bahkan jarang menyerupai praktik ekonomi modern. Perubahan yang intens adalah sifat dari perubahan yang mendorong kenyataan menuju ekonomi 'kapital'. Pemikiran

'modern' memang mengakui bahwa kombinasi kekuatan hadiah dan hukuman merupakan salah satu yang terkuat dalam membentuk perilaku yang membantu dengan hasil yang mudah dicapai.

- *"Dengan segera, saya mengetahui bahwa Bupati, berdasarkan tanggung jawabnya sendiri dan demi kepentingannya sendiri, memanggil penduduk agar bekerja untuknya dengan jumlah yang jauh melebihi jumlah panceh atau kemit yang diperbolehkan secara hukum."* (Hal 498)

Meskipun tertindas, orang-orang tersebut tidak sepenuhnya diam. Mereka menumbuhkan beragam bentuk pembangkangan sebagai protes, dengan tenang dengan mengolah benih dengan air mendidih, atau secara terang-terangan dengan membakar pabrik gula yang dari tahun 1845-1850. Perlawanan ini menandakan bahwa kurangnya kepuasan dengan sistem yang tidak adil dan pembelaan yang terus-menerus atas hak-hak mereka.

### 3. Perjuangan Kelas

Dalam pemikiran Karl Marx, perjuangan kelas merupakan inti dari sejarah umat manusia. Marx menegaskan bahwa sejarah seluruh masyarakat hingga kini adalah sejarah dari pertarungan antar kelas. Konsep ini pertama kali disampaikan secara eksplisit dalam *The Communist Manifesto* (1848), di mana Marx dan Engels menuliskan bahwa pertarungan antara kelas penindas dan kelas tertindas seperti tuan dan budak, bangsawan dan rakyat jelata, hingga borjuis dan proletariat telah menjadi kekuatan utama yang mendorong perubahan sosial dan

revolusi. Lebih lanjut, dalam *Capital* (1867), Marx menjelaskan bagaimana kelas pemilik alat produksi memanfaatkan tenaga kerja kaum proletar demi keuntungan pribadi, sehingga menciptakan ketimpangan struktural dan kondisi yang mendorong konflik kelas.

Berikut ini dapat dicontohkan dalam kutipan novel *Max Havelaar* karya Multatuli, yang menggambarkan kondisi ketimpangan sosial akibat eksploitasi kolonial terhadap rakyat pribumi, selaras dengan semangat perjuangan kelas dalam Marxisme.

- *"Secara alami, orang Jawa adalah petani, tanah tempat mereka dilahirkan yang memberikan hasil berlimpah dengan sedikit tenaga, memikat mereka dan yang terutama, mereka membaktikan seluruh hati serta jiwa mereka untuk menggarap sawah, dan dalam hal ini, mereka sangat pandai."* (Hal 107)

Kutipan ini menggambarkan bahwa rakyat Jawa, sebagai petani, memiliki hubungan yang sangat kuat dan alami dengan tanah mereka. Mereka bekerja keras, dengan penuh dedikasi dan keahlilan, untuk mengolah sawah demi kehidupan. Namun, dalam konteks kolonialisme, kerja keras dan kecintaan mereka terhadap tanah justru dimanfaatkan oleh kelas penguasa baik kolonial Belanda maupun elite lokal untuk kepentingan ekonomi mereka sendiri. Petani menjadi tulang punggung produksi, tapi tidak mendapatkan keadilan atas hasil kerja mereka. Adanya sebuah ketimpangan di mana kelas pekerja (petani) terus menerus dieksploitasi oleh mereka yang berada di atas, tanpa memiliki kendali atas hasil jerih payahnya sendiri

- “Mereka dibesarkan ditengah sawah, gagah dan tipar, **semasa kecil, mereka menemani ayah mereka ke sawah, disana mereka membantu pekerjaan ayah mereka dengan membajak dan mencangkul, membangun bendungan dan saluran untuk mengairi sawah, mereka menghitung usia berdasarkan panenan, memperkirakan waktu berdasarkan warna dedaunan di sawah.”**
- “...Namun, kemudian datanglah orang-orang asing dari barat yang mengangkat diri mereka sebagai pemilik tanah. Mereka ingin mendapatkan keuntungan dari kesuburan tanah itu, dan memerintahkan orang pribumi untuk menyisihkan sebagian waktu dan tenaga mereka untuk menggarap tanaman-tanaman lain yang bisa menghasilkan keuntungan lebih tinggi di pasar-pasar Eropa.” (Hal 107)

Kutipan ini menggambarkan realitas pahit perjuangan kelas yang dihadapi petani pribumi. Mereka tumbuh dan hidup dari tanah yang mereka garap sendiri dengan penuh cinta dan keterampilan, namun akhirnya dipaksa tunduk pada kepentingan ekonomi penjajah. Kehadiran orang asing dari Barat yang mengklaim kepemilikan atas tanah leluhur mereka menandai pergeseran kekuasaan dari rakyat ke tangan penjajah. Petani tidak lagi bebas mengelola sawahnya untuk kehidupan sendiri, melainkan harus bekerja untuk menghasilkan komoditas yang menguntungkan pasar Eropa. Ini adalah bentuk nyata penindasan kelas, di mana kelas penguasa kolonial mengeksploitasi tenaga dan sumber daya petani demi

keuntungan, sementara petani tetap miskin dan kehilangan kendali atas hasil kerja mereka.

- “Bencana kelaparan? Bencana kelaparan di Jawa yang kaya dan subur? Ya, pembaca, beberapa tahun silam ada distrik-distrik yang kehilangan penduduk akibat kelaparan, para ibu menjual anak mereka untuk mendapat makanan, para ibu menyantap anak mereka sendiri.” (Hal 104)

Kutipan ini memperlihatkan bentuk paling tragis dari perjuangan kelas, di mana rakyat kecil menderita kelaparan bahkan sampai pada titik kehilangan kemanusiaan—menjual atau memakan anak sendiri di tanah yang sebenarnya subur dan kaya. Sementara hasil bumi terus mengalir ke tangan para pejabat kolonial dan elite, rakyat yang bekerja keras mengolah tanah justru tidak mendapatkan hak hidup yang layak.

- “**Havelaar bersumpah dengan saksi Tuhan** yang Mahakuasa bahwa dia 'akan melindungi penduduk pribumi terhadap penindasan, perlakuan buruk, dan pemerasan.'” (Hal 167)

Sumpah ini menjadi dasar moral perjuangan Havelaar. Ia menegaskan keberpihakannya pada rakyat tertindas, bahkan dengan risiko kehilangan kariernya. Ini adalah bentuk perlawanannya moral dan ideologis terhadap sistem kolonial yang menindas.

- “Verbrugge! Akan kukatakan mengapa aku melakukan ini. Bupati tidak punya uang sepeserpun di rumahnya; juru tulisnya sendiri berkata begitu kepadaku... **Aku lebih suka melanggar sebuah formulir**

**dengan tanggung jawabku sendiri** daripada membiarkan seseorang yang berkedudukan dan berusia seperti dia mengalami kesusahan... Lagi pula, Verbrugge, orang-orang di Lebak menyalahgunakan kekuasaan mereka dengan cara yang mengerikan—kau seharusnya tahu itu!" (Hal 208)

Dalam kutipan ini, Havelaar menunjukkan empatinya terhadap penderitaan pejabat lokal dan rakyat yang menjadi korban penyalahgunaan kekuasaan. Dengan memilih untuk melanggar prosedur formal demi membantu mereka, Havelaar menentang sistem birokrasi kolonial yang kaku dan tidak manusiawi.

- "Tanpa mengetahui kecenderungan semuanya ini, aku menentang mereka, sampai-sampai merasa wajib untuk menolak menandatangani beberapa dokumen, dan dalam hal ini aku sangat menyenggung perasaan Jenderal." (Hal 351)

Havelaar berani menolak perintah atasan yang dianggapnya tidak adil, menunjukkan integritas moral dan keberaniannya untuk melawan otoritas jika itu merugikan rakyat. Ini adalah bentuk perlawanan terhadap pejabat kolonial yang mencoba menutup-nutupi ketidakadilan.

- "Kukatakan bahwa aku bisa membuktikan tuduhan itu... di tempat yang penduduknya dikatakan tenang dan puas, kunyatakan bahwa kemarahan mereka sering kali nyaris meledak..." (Hal 373)

Havelaar membongkar ilusi kesejahteraan yang ditampilkan oleh sistem kolonial, mengungkap bahwa sebenarnya rakyat berada di ambang pemberontakan akibat ketidakadilan yang sistematis. Ini menunjukkan keberaniannya dalam mengungkap kebenaran yang disembunyikan oleh pihak berwenang.

- "Sekali lagi, saya memohon untuk dianggap sebagai teman yang akan membantu kalian sebisa mungkin, terutama ketika ketidakadilan harus dicegah." (Hal 205)

Havelaar ingin dipandang bukan sebagai pejabat penjajah, tetapi sebagai teman rakyat. Ia menyatakan tekadnya untuk membantu dan melindungi mereka dari ketidakadilan, menunjukkan sikap yang bertentangan dengan budaya kekuasaan kolonial yang menindas.

- "Akan kutunjukkan kepadanya, betapa buruknya menyalahgunakan kekuasaan terutama ketika menyangkut harta benda orang miskin... Aku juga ingin memohon pemerintah agar membebaskan Bupati dari uang mukanya." (Hal 218)

Havelaar menegaskan bahwa kekuasaan harus digunakan untuk melindungi, bukan menindas. Ia mengkritik praktik eksloitasi dan menunjukkan bahwa keadilan bisa ditegakkan dengan keberanian pribadi, serta berusaha membebaskan pejabat lokal dari beban ekonomi yang menjerat.

- "Para pemimpin Lebak, kita sering kali melakukan kesalahan, dan desa kita miskin karena kita telah melakukan

begitu banyak kesalahan." (Hal 193)

Havelaar mengajak para pemimpin lokal untuk mawas diri dan memperbaiki kondisi masyarakat. Ini adalah bentuk perlawanannya melalui kesadaran kolektif, bukan konfrontatif, tetapi tetap bermuatan kritik sosial terhadap sistem yang ada.

## KESIMPULAN

Dengan demikian penelitian ini membahas tentang tindakan protes Havelaar terhadap ketidakadilan pada rakyat yang dituangkan melalui pembahasan tentang Ketimpangan Kelas dalam Sistem Tanam Paksa yang membahas bahwa novel ini menggambarkan rakyat pribumi sebagai kelas tertindas yang dipaksa bekerja demi keuntungan kolonial serta peran pemerintah Belanda sebagai pemilik modal yang mengeksploitasi pekerja pribumi. Eksplorasi Ekonomi dan Perdagangan Kopi, perdagangan kopi dalam novel ini mencerminkan kapitalisme kolonial yang memberatkan rakyat pribumi, Serta keuntungan dari Sistem Tanam Paksa tidak dinikmati oleh rakyat pribumi, tetapi malah memperkaya penguasa kolonial.

Perlawanannya dan kegagalan Max Havelaar sebagai Simbol Perjuangan Kelas dibahas bahwa Max Havelaar yang berusaha melawan sistem walaupun akhirnya gagal, serta pada novel ini menggambarkan ketidakberdayaan individu melawan sistem dan ada pesan revolusioner. Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah pembaca dapat mengetahui tentang ketimpangan kelas,

kesadaran kelas, serta perjuangan kelas yang dilakukan Max Havelaar untuk pribumi yang dipekerjakan secara tidak manusiawi. Menimbulkan rasa nasionalisme pada diri mengenai kejamnya masa kolonialisme pada pribumi dan pejabat yang saling berkolusi demi uang dan kekuasaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Tri, W. (Juli 2013). Sosiologi Sastra Alan Swingewood Sebuah Teori. *Jurnal Poetika*, Vol. 1 No.1.
- Wulan, S. (t.thn.). Dampak Cultuurstelsel (Tanam Paksa) Bagi Masyarakat Indonesia dari Tahun 1830-1870. *Jurnal Artefak*.
- Subur, H. (Juni 2020). Teori Kelas Sosial dan Marxisme Karl Marx. *PARADIGMA: Jurnal Kalam dan Filsafat*, Vol. 2, No. 1 hal 13-28.
- Rahmatila, N. A., Salwa, R. Z., Yuza, N. S., & dkk. (Maret, 2025). Perjuangan Tokoh Pribumi pada Novel "Namaku Alam" Karya Leila S. Chudori. *SEBASA (Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia)*, Vol. 8, No.1.
- Dewi, T. R. (2023, Agustus Kamis ). Menilai Marxisme dan Diskriminasi Kasta Dalam Novel Jejak Langkah Karya Pramoedya Anata Toer. hal. 2.
- Nurgiyantoro, & Burhan. (2018). Teori Pengkajian Fiks. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Siswanto, D. (t.thn.). *Pengantar Teori Sastra*. Jl. Pal Merah Selatan, Jakarta:

- GRASINDO (Gramedia Widiasarana Indonesia).
- ratna, N. K. (t.thn.). Sosiologi sastra: Perkembangan Teori dan Metode. *Pustaka Belajar*.
- Attamimi, G. R., Kinseng, R. A., & Agusta, I. (Desember 2018). Kelas dan Ketimpangan Struktural Masyarakat Nelayan di Kota Ambon. *Sodality: Jurnal sosiologi Pedesaan*, Vol 6 No. 3 Hal 228-236.
- Marx, K. (1959). Capital. *Progress Publisher*, Jil. 1.
- Austin Warren, & Rene Wellek. (Terbitan Bahasa Indonesia 2016). *Teori Kesusasteraan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Sujarwa. (2019). Model & Paradigma Teori Sosiologi Sastra. Universitas Ahmad Dahlan.
- Suseno, F. M. (Oktober 2016). *Pemikiran Karl Marx Dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Moleong, L. J. (2013). Metodologi Penelitian Kualitatif edisi revisi. *Metodologi Penelitian Kualitatif edisi revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Arikunto S. 2013. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Krippendorff. (1980). *Content analysis: an introduction to its methodology*. Beverly Hills, California: Sage Publication Plc.e.
- Marx, K. 1970. *The Communist Manifesto of Karl Marx and Friedrich Engels*. New York : Pathfinder Press.
- Marx, K & Engels, F. 1976. *Collected Work*. New York : International Publishers.